

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Malang: Selaras, 2013)
- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- _____. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- _____. *Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)* (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1983)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 1989)
- _____. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994)
- Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Cetakan ke-1, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014)
- G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991)

- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Cetakan ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hotma P. Sibuea, *et.al, Dinamika Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017)
- Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Maada, 1968)
- Jonas Taslim, *PPAT dan Peralihan Hak Atas Tanah (Suatu Analisis Yuridis Normatif)*, (Bandung: Tarsito, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Kartini Muljadi, *et.al., Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017)
- Mukti Fajar Nur Dewata, *et.al, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Transmedia, 2010)
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Siguntang, 1971)

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-5, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)
- _____. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembantuan Peradilan Administrasi*”, Cetakan Ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Cetakan Ke-1, (Banjarmasin: FH UI Press, 2016)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-9, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
- _____. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Intermasa, 1991)
- _____. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Sri Mamudji, *et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Soerjono Soekanto, *et.al, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: UI Press, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Waskito, *et.al., Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2017)
- Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971)
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cetakan ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

_____. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443).

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608 Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

_____. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138/PDT/2018/PT.DKI.

_____. Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt/2019.

D. Makalah, Artikel dan Internet

Andi Rustandi, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses tanggal 17 September 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia*. http://www.jimly.com//Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 17 September 2023.

Kompas.com, *Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK*, 21 Mei 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses tanggal 17 September 2023.

E. Kamus

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, (Indonesia: Pustaka Kemang, 2016).

Yudha Pandu, *Kamus Hukum* (Indonesia: Legal Centre Publishing, 2006).

F. Wawancara

Hasil wawancara dengan Tan Susy, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, Tanggal 6 November 2023, Pukul 13.00 wib.

Hasil wawancara dengan Tan Swandy, Notaris, Tangerang, Tanggal 7 November 2023, Pukul 15.00 wib.

Hasil wawancara dengan Fudrawanto Juanda, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Samarinda, via Telepon, Tanggal 5 November 2023, Pukul 16.00 wib.

Hasil wawancara dengan Dafriansyah, Pengacara dan mantan Kepala Seksi Pendaftaran dan Peralian Hak pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, via Telepon, Tanggal 8 November 2023, Pukul 15.00 wib.